

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Pertumbuhan ekonomi adalah masalah jangka panjang di mana perekonomian suatu negara berkembang ke keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu, dan juga dapat dikaitkan dengan keadaan peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian, yang diwujudkan sebagai peningkatan pendapatan nasional. . Pertumbuhan ekonomi mereka adalah tanda keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam analisis makro, pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan keseimbangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu Negara. (Ernita, 2013).

Pertumbuhan ekonomi juga sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemampuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jonaidi, 2012)

Pertumbuhan ekonomi juga dapat dikatakan sangat berarti dalam perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu Negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu Negara, ukuran yang

selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Ciptawaty, 2019)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu negara dalam kurun waktu tertentu adalah produk domestik bruto. Menurut Kantor Pusat Statistik, PDB (produk domestik bruto) adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit bisnis di suatu negara tertentu, atau nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi. Pertumbuhan suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah kompensasi riil yang digunakan dalam faktor-faktor produksi tahun tertentu lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun Kebijakan makro ekonomi secara garis besar dibagi menjadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, seperti halnya perekonomian dapat dibagi menjadi sektor riil dan sektor moneter. Sektor tersebut dapat dibagi menurut kelompok kegiatan atau sub-sektornya, seperti pertanian, pertambangan, industri, dan lain-lain. Sedangkan sektor moneter dapat dikatakan hasil dari sektor riil berupa uang (aspek moneter dari perekonomian). Pemerintah mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas sektor riil melalui kebijakan fiskal, dan di Indonesia hal ini menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan. Pada saat yang sama, pemerintah mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas moneter melalui kebijakan moneter, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia. Koordinasi antara kedua kebijakan tersebut sangat penting karena akan menciptakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan (Pujiati, 2008).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011-2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Data pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai dari tahun 2011-2020. Pulau Morotai memiliki luas 4.301,53 kilometer persegi, luas daratan 2.314.960 kilometer persegi, luas laut 4 mil dan luas 1.970,93 kilometer persegi. Garis pantainya sepanjang 311.217 kilometer. Jumlah pulau di Kabupaten Morotai adalah 33 pulau, dengan rincian 7 pulau berpenghuni dan 26 pulau tidak berpenghuni. Secara administratif, Pulau Morotai telah dimasukkan ke dalam Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara sejak tahun 2002, dengan ibukota Torbello, berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Maluku Utara, Surat Keputusan No. 188.4/06/DPRD/MU/2002 tanggal 15 Februari 2002. Pada tahun 2009, menurut Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Molotai, Pulau Molotai merdeka dari Kabupaten Halmahera dan menjadi Kabupaten Molotai. Kabupaten Morotai terbagi menjadi 5 jalan yaitu: Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Timur, Morotai Barat Daya, Morotai Utara dan Morotai Jaya yang terbagi menjadi 64 desa.

Yang paling padat penduduknya adalah Kabupaten Morotai Selatan dengan jumlah 18.304 jiwa. Morotai Utara memiliki populasi terkecil di 7.372. Jalan dengan luas daratan terluas adalah Morotai Timur, dengan luas 731,80 kilometer persegi dan jumlah penduduk 8.115 jiwa, dengan kepadatan penduduk terendah 7,42 jiwa per kilometer persegi. Sementara itu, Morotai Barat Daya memiliki luas daratan terendah sebesar 362,80 Km² dan tingkat kepadatan 27,36 jiwa/Km², namun wilayah Kabupaten Morotai Selatan dengan luas 363,10 Km² merupakan jalan dengan kepadatan penduduk tertinggi sebesar 45,56 jiwa/Km².

Dengan demikian, Kabupaten Pulau Morotai memiliki jumlah penduduk 54.971 jiwa, luas daratan 2.314,97 Km² dan kepadatan penduduk 35,82 jiwa/Km².

Wilayah Kabupaten Pulau Morotai berada pada ketinggian 0-1000 m di atas permukaan laut yang meliputi wilayah datar, berombak, berbukit-bergelombang, curam dan terjal. Wilayah dataran rendah berada di bagian selatan dari Kabupaten Pulau Morotai dengan bentuk wilayah datar sampai berombak.

Tabel 1.1 PDRB Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011-2020

Tahun	PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHK)
2011	0%
2012	6%
2013	6%
2014	6%
2015	6%
2016	6%
2017	6%
2018	6%
2019	4%
2020	2%

Sumber : BPS, Morotai tahun 2011-2020

Jika dilihat dari presentase PDRB menurut lapangan usaha (ADHB) Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 sampai dengan 2020 terjadi perubahan yang cukup drastis. Penurunan angka PDRB terjadi pada tahun 2011 dan mengalami kenaikan hebat pada tahun 2020 kemarin. Sehingga bisa dikatakan kemajuan dalam angka penurunan kemiskinan Kabupaten Pulau Morotai setelah menjadi daerah otonomi baru sangatlah membaik.

Besarnya suatu kategori terhadap nilai total PDRB suatu daerah juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan kata lain,

pergerakan kategori lapangan usaha yang memiliki pengaruh besar juga terhadap pertumbuhan ekonomi, (Wenda, 2015). Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 4 ayat 1 pembentukan daerah harus memenuhi syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan. Adapun, administrasi adalah persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi wilayah provinsi dan persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur serta dalam rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Kemudian, syarat teknis meliputi faktor yang mendasar, seperti kemampuan ekonomi, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya ekonomi (Syahputra, 2017)

Adapun pendapatan per kapita yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, pendapatan per kapita ini dapat didekati dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Oleh karena itu, PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh besarnya kedua variabel tersebut. Artinya, jika nilai PDRB besar dan jumlah penduduk sedikit, maka PDRB per kapita besar, dan sebaliknya jika nilai PDRB kecil dan jumlah penduduk besar, maka nilai PDRB per kapita kecil. Data PDRB per kapita dinilai dengan dua cara, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB per kapita ADHB dapat menggambarkan per kapita NTB yang masih dipengaruhi oleh harga barang yang dihasilkan. Adapun PDRB per kapita ADHK merupakan pertumbuhan nyata ekonomi perkapita, umumnya digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur ekonomi rakyat secara keseluruhan. Walaupun terjadi peningkatan PDRB per kapita akan tetapi hal ini belum dapat menggambarkan tingkat penyebaran pendapatan masyarakat di setiap strata ekonomi, (Syahputra, 2017).

Kemiskinan juga merupakan salah satu masalah mendasar karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan paling dasar dalam hidup, dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak negara. Salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya aset pendapatan (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang layak. Selain itu, kemiskinan juga dikaitkan dengan terbatasnya kesempatan kerja dan sering digolongkan sebagai pengangguran (unemployed) miskin (miskin) yang umumnya memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai.

Tabel 1.2 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pulau Morotai 2011-2020

Tahun	Kemiskinan
	(Persen)
2011	11.60
2012	9.45
2013	9.18
2014	8.74
2015	8.39
2016	7.08
2017	7.07
2018	7.16
2019	7.27
2020	6.46

Sumber : BPS, Morotai 2011-2020

Jika dilihat dari presentase tingkat kemiskinan Kabupaten Pulau Morotai tahun 2011 sampai dengan 2020 terjadi perubahan yang cukup drastis. Kenaikan angka kemiskinan terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah 11,60% dan mengalami penurunan hebat pada tahun 2020 kemarin sebesar 6,46%. Sehingga bisa dikatakan kemajuan dalam angka penurunan kemiskinan Kabupaten Pulau Morotai setelah menjadi daerah otonomi baru sangatlah membaik.

Pengangguran adalah suatu ukuran yang dilakukan seseorang apabila seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut.

Jika di lihat dan di bandingkan dengan Kabupaten Halmahera Utara dengan mata telanjang, maka bisa dikatakan bahwa Kabupaten Pulau Morotai mengalami peningkatan pembangunan dan lain-lainnya dibandingkan dengan Kabupaten Halmahera Utara. Sehingga Peneliti ingin mengetahui bagaimana Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Pendapatan Perkapita mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi sebagai daerah otonomi baru jika di bandingkan dengan Kabupaten Halmahera Utara.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah didalam penelitian terdahulu lebih meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi pada umumnya atau sesuai dengan teorinya yaitu, sumber daya manusia, sumber daya alam dan akumulasi modal itu sendiri. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti mengambil Pendapatan Perkapita, Kemiskinan dan Pengangguran sebagai variabel yang apakah ia berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah itu sendiri.

Dengan masalah di atas merujuk pada penelitian Syahputra (2017) tentang "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor,

penerimaan pajak dan nilai tukar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar permasalahan di atas maka persoalan-persoalan penelitian yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Perkapita mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai.?
2. Apakah Tingkat Kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai.?
3. Apakah Tingkat Pengangguran mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pulau Morotai.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan kebijaksanaan dan mengenai masalah pertumbuhan ekonomi.
2. Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan masalah pertumbuhan ekonomi.
3. Sebagai salah satu sumber informasi tentang masalah pertumbuhan ekonomi
suatu daerah.

